

### **Peran Industri Garmen sebagai Motor Pemberdayaan Perempuan di Bangladesh: Analisis Indikator**

#### *The Role of Garment Industry as a Motor for Women Empowerment in Bangladesh: Indicator Analysis*

**Intan Tiara Kartika<sup>1\*</sup>, Nur Azizah<sup>2</sup>**

Universitas Negeri Gorontalo<sup>1</sup>, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta<sup>2</sup>  
intantiarak@gmail.com\*

Diterima 29 Desember 2024 | Direvisi 19 April 2025 | Diterbitkan 2 Mei 2025

#### **ABSTRACT**

*This article aims to analyze the role of the garment industry as a driver of women's empowerment in Bangladesh, employing a qualitative approach based on literature review. The study focuses on two main aspects: gender disparities in human development indicators and gender distribution within the labor structure of the garment sector. Findings reveal that despite women's increased access to education and life expectancy, these improvements are not followed by significant gains in labor force participation or income generation. Furthermore, women are highly concentrated in lower-level production roles, while men dominate managerial positions, indicating unresolved structural inequality. Using Naila Kabeer's (1999) empowerment framework, this article concludes that access to employment does not automatically imply empowerment unless accompanied by control over resources and social agency. Hence, women's empowerment in the garment industry should be understood as a multidimensional process involving simultaneous social, economic, and cultural transformation.*

**Keywords:** Bangladesh, Garment Industry, Gender Inequality, Human Development Index, Women's Empowerment

#### **ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran industri garmen sebagai motor pemberdayaan perempuan di Bangladesh dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka. Fokus penelitian terletak pada dua aspek utama: ketimpangan indikator pembangunan manusia berdasarkan gender, dan distribusi gender dalam struktur kerja industri garmen. Temuan menunjukkan bahwa meskipun perempuan telah mengalami peningkatan dalam akses pendidikan dan harapan hidup, hal tersebut tidak diikuti dengan peningkatan signifikan dalam partisipasi tenaga kerja maupun penghasilan aktif. Selain itu, perempuan terkonsentrasi pada posisi produksi tingkat rendah, sedangkan laki-laki mendominasi posisi manajerial. Hal ini menegaskan adanya ketimpangan struktural yang belum terselesaikan. Dengan menggunakan kerangka pemberdayaan Naila Kabeer (1999), artikel ini menyimpulkan bahwa akses terhadap pekerjaan tidak otomatis berarti

pemberdayaan, kecuali disertai dengan kontrol atas sumber daya dan agensi sosial. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan dalam konteks industri garmen harus dipahami sebagai proses multidimensi yang mencakup transformasi sosial, ekonomi, dan kultural secara bersamaan.

**Kata kunci:** *Bangladesh, Indeks Pembangunan Manusia, Industri Garmen, Ketimpangan Gender, Pemberdayaan Perempuan*

## PENDAHULUAN

Selama beberapa decade terakhir, Bangladesh berhasil tumbuh menjadi negara dengan kemajuan ekonomi yang pesat. Negara yang merdeka pada 1971, terkenal sebagai negara miskin bahkan pernah diberikan julukan sebagai *Bottomles Basket* atau 'keranjang tanpa dasar'. Istilah ini merujuk pada bantuan sebesar apapun, akan tetap kurang bagi Bangladesh (Ranawana, 2022). Sejak 1975, PBB menggolongkan Bangladesh sebagai negara paling tidak berkembang atau *Least Developed Countries* (LDC) (Hussain, 2021). Namun PBB telah menetapkan jalur bagi negara tersebut untuk lulus dari status tersebut setelah memenuhi kriteria yang disyaratkan. Sejumlah indikator utama Bangladesh telah membaik mulai dari pendapatan, aset manusia, dan kerentanan ekonomi, yang sangat penting dalam transisi menuju perekonomian berpendapatan menengah (Ziaur Rahman et al., 2020).

Perekonomian Bangladesh terus berkembang setiap tahunnya. Diantara negara Asia Selatan lainnya, Bangladesh dianggap sedang naik daun. Pada 2019, pendapatan perkapitanya sebesar \$1.856, sedikit lebih tinggi dari Pakistan yang hanya \$1.285. Pada 2020, Bangladesh mungkin telah mengungguli India karena mencatat tingkat pertumbuhan 3,4 persen sedangkan PDB India menyusut 7,3 persen (Yusuf, 2021). Pertumbuhan ekonomi Bangladesh dianggap cukup mengesankan dengan rata-rata pertumbuhan 6% pertahun. Ekonomi Bangladesh bahkan mampu tetap tumbuh ditengah gempuran pandemi COVID 19 pada 2020.

Kunci penting pertumbuhan ekonominya berasal dari industri RMG (*Ready Made Garment*). Saat ini Bangladesh telah menjadi manufaktur dan eksporter garmen kedua terbesar di dunia. Industri garmen negara ini telah menjadi salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat secara global sejak tahun 1990-an. Garmen juga berkontribusi pada sumber utama pendapatan luar negeri Bangladesh selama tiga dekade terakhir (Swazan & Das, 2022). Industri garmen siap pakai (RMG) merupakan industri manufaktur padat karya

dengan upah rendah. Menurut World Bank dan OECD, kontribusi sektor RMG terhadap total ekspor nasional mencapai lebih dari 80%, menjadikannya sebagai tulang punggung ekonomi Bangladesh (Ganbold, 2022; World Bank Group, 2021). Namun, di balik angka-angka makroekonomi tersebut, terdapat dinamika sosial yang kompleks, terutama berkaitan dengan posisi perempuan dalam masyarakat yang masih sarat dengan nilai-nilai patriarki.

Perempuan di Bangladesh secara historis mengalami marginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, hingga pengambilan keputusan di tingkat keluarga dan masyarakat. Perempuan secara tradisional dianggap bertanggung jawab untuk melahirkan dan membesarkan anak-anak. Mereka akan lebih dihargai jika melahirkan anak laki-laki agar bisa meneruskan nama keluarga. Mengingat struktur patriarki yang kental, maka anak perempuan menjadi sangat bergantung kepada ayahnya. Saat menikah, suaminya yang menjadi pelindung perempuan. Struktur sosial patriarki yang dominan membentuk norma-norma yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, baik di ranah domestik maupun publik (Murshid, 2018). Dalam konteks tersebut, industri garmen muncul sebagai salah satu jalur utama bagi perempuan untuk memasuki ranah publik melalui keterlibatan dalam pekerjaan bergaji. Namun, partisipasi ini tidak serta merta menghapuskan kendala-kendala struktural yang menghambat otonomi dan agensi perempuan.

Istilah “motor” dalam konteks pembangunan ekonomi digunakan untuk menggambarkan sektor atau kekuatan penggerak utama yang berperan dalam menciptakan perubahan struktural, baik dalam dimensi ekonomi maupun sosial. Dalam studi pembangunan, sektor informal—yang mencakup industri padat karya seperti RMG—disebut sebagai “motor” karena kemampuannya menciptakan lapangan kerja secara luas, meningkatkan mobilitas sosial, dan menyediakan peluang ekonomi bagi kelompok yang sebelumnya termarginalisasi, termasuk perempuan. Meskipun sektor informal beroperasi di luar kerangka regulasi formal, perannya dalam menyediakan akses terhadap layanan sosial dan keamanan ekonomi tidak dapat diabaikan (Kakaire, 2023).

Dalam berbagai kasus menunjukka bahwa sektor informal memiliki ketangguhan dan fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi tantangan ekonomi. Ghana misalnya, *eco-innovation* yang berkembang di sektor informal mampu menghasilkan praktik-praktik ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini memperlihatkan bahwa sektor informal tidak hanya

penting dalam menciptakan pekerjaan, tetapi juga dalam merancang masa depan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Rama et al., 2022). Dalam konteks Bangladesh, industri RMG bukan hanya menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi arena kontestasi sosial, tempat perempuan membangun ulang posisi dan peran mereka dalam masyarakat.

Namun demikian, untuk memahami apakah sektor ini benar-benar berkontribusi terhadap pemberdayaan perempuan, diperlukan pendekatan konseptual yang lebih tajam. Pemberdayaan bukan hanya soal akses terhadap sumber daya ekonomi, tetapi juga mencakup agensi—kemampuan individu untuk membuat keputusan strategis dalam kehidupan mereka. Dimensi pemberdayaan mencakup perubahan dalam kesadaran diri, transformasi norma sosial, dan hasil nyata dalam bentuk peningkatan kualitas hidup (Kabeer, 1999). Dengan kata lain, perempuan yang bekerja di sektor garmen tidak otomatis menjadi "berdaya" hanya karena mereka memperoleh pendapatan, tetapi harus dilihat dari seberapa jauh mereka memiliki kontrol atas pendapatan tersebut, apakah mereka memiliki suara dalam pengambilan keputusan keluarga, serta apakah partisipasi mereka mengubah persepsi sosial tentang peran gender.

Lebih lanjut, pemberdayaan yang sejati melibatkan empat domain utama: pengambilan keputusan, kemandirian ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Keempat domain ini saling terkait dan membentuk indikator pemberdayaan yang dapat diamati secara empiris. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan merupakan indikator utama dari empowerment, baik di tingkat individu maupun komunitas (Tengland, 2008). Dalam konteks industri garmen, penting untuk melihat apakah perempuan memiliki akses terhadap posisi manajerial, atau apakah mereka tetap terjebak dalam pekerjaan produksi dengan bayaran rendah tanpa prospek mobilitas vertikal.

Di sisi lain, partisipasi perempuan dalam sektor informal sering kali dikaitkan dengan fleksibilitas kerja, yang memungkinkan mereka untuk tetap menjalankan peran domestik. (Sansiya, 2013) menekankan bahwa pekerjaan informal dapat memberikan ruang bagi perempuan untuk mengelola waktu dan peran ganda, tetapi juga menyisakan risiko dalam bentuk ketiadaan perlindungan sosial dan ketidakamanan kerja. Dalam hal ini, pekerjaan di sektor garmen dapat dilihat sebagai pedang bermata dua: membuka peluang sekaligus menghadirkan tantangan baru.

Oleh karena itu, pemahaman tentang pemberdayaan tidak boleh dilepaskan dari konteks sosial dan struktural tempat perempuan berada. Agensi perempuan dalam sektor informal sering kali dibentuk dalam negosiasi yang kompleks dengan norma-norma patriarkal, yang tetap membatasi ruang gerak mereka (Das, 2023; Jokinen, 2016). Dalam beberapa kasus, perempuan menunjukkan bentuk agensi yang subtil, seperti menolak posisi manajerial karena beban ganda, atau memilih tetap bekerja meski menghadapi tekanan dari keluarga.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan acuan. Pertama, “*Unboxing the Ready Made Garments (RMG) sector of Bangladesh*”, yang membahas mengenai meningkatnya ekspor Bangladesh yang tidak lepas dari perkembangan sektor garmen siap pakai (RMG). Penelitian ini berfokus pada proses RMG yang memproduksi unit manufakturnya untuk pasar domestic maupun pasar ekspor. Chowdhury menjelaskan secara mendetail bagaimana RMG telah berkontribusi pada investasi, lapangan kerja, perdagangan, ekspor dan ekonomi Bangladesh secara keseluruhan (Chowdhury & Shajahan, 2021). Lebih lanjut dalam artikel lain, yang berjudul “*Impact of Empowerment, Flexibility and Trust on Women’s Access to Senior Positions in RMG Industry Of Bangladesh*”, membahas lebih jauh mengenai perempuan dalam sector RMG. Studi ini bertujuan untuk menguji dampak pemberdayaan, fleksibilitas dan kepercayaan dalam industri RMG di mana lebih dari 90% pekerja adalah perempuan. Dengan menggunakan metode convenience sampling untuk 200 responden wanita yang bekerja di berbagai posisi industri RMG di Dhaka, Bangladesh, ditemukan bahwa pemberdayaan dan kepercayaan memiliki dampak yang signifikan terhadap akses perempuan ke posisi senior di organisasi RMG Bangladesh (Islam et al., 2018).

Artikel lain yang dijadikan acuan adalah “*Women’s Empowerment and Economic Development: the Cases of Bangladesh and Kenya*”. Penelitian ini membandingkan isu-isu perempuan di Bangladesh dan Kenya yang menjelaskan bahwa pendidikan dan status sosial perempuan, menentukan kondisi kehidupan mereka. Dalam artikelnya Gocio memperlihatkan bahwa Bangladesh sedikit lebih maju dibandingkan Kenya dalam isu pemberdayaan perempuan. Akan tetapi secara keseluruhan perempuan Bangladesh dan Kenya telah membuat kemajuan luar biasa meskipun ada tantangan hidup dalam masyarakat patriarki yang ditempa dengan kerusuhan sipil, kemiskinan dan masalah politik (Gocio, 2016).

Hal senada juga terlihat dalam artikel berjudul “*Women’s Empowerment in Bangladesh: Understanding through the case of Readymade Garment Sector*”. Penelitian ini berfokus bagaimana sektor garmen siap pakai (RMG) telah cukup memberikan kesempatan bagi para perempuan untuk mendapatkan kemandirian ekonomi. Lebih jauh, penelitian ini mengkaji bagaimana tanggapan laki-laki terhadap partisipasi perempuan dalam sector RMG. Penulis memperlihatkan bahwa beberapa laki-laki mendukung pasangan perempuannya untuk bekerja karena RMG telah membuka kesempatan untuk menaikkan standar hidup dengan mendapatkan pendapatan tambahan. Akan tetapi di ranah privat, tingkat pertengkaran suami istri terkait anak, uang dan pekerjaan rumah tangga menjadi lebih tinggi. Bahkan wanita yang berpenghasilan, menjadi tidak dapat merasakan hasil kerja kerasnya, karena mereka harus menyerahkannya kepada suami mereka. Suasana patriarki masih sangat kental dimana suami masih mendominasi rumah tangga dan jarang berbagi tugas dengan perempuan yang bekerja. Dukungan para laki-laki hanya sampai pada penerimaan mereka terhadap kemauan perempuan untuk bekerja, akan tetapi kontribusi perempuan dari segi finansial dan fisik terhadap keluarga tetap tidak akui (Sen Sharma, 2020).

Budaya patriarki memang masih sangat kental di Bangladesh. Dalam “*Migration, Labor and Women’s Empowerment: Evidence from an Agricultural Value Chain in Bangladesh*”, penulis memperlihatkan bagaimana sektor pertanian berperan terhadap tenaga kerja dan pemberdayaan perempuan. Kurangnya tenaga kerja laki-laki karena banyak dari mereka yang bermigrasi dari pedesaan ke perkotaan, membuat perempuan mengambil alih tugas produksi. Akan tetapi dalam penelitiannya ditemukan bahwa migrasi yang dilakukan para lelaki tidak semerta-merta meningkatkan kesejahteraan bagi perempuan yang tetap tinggal di rumah dan berperan dalam sektor pertanian. Para perempuan tidak dihargai untuk beban kerja tambahan mereka. Kesenjangan upah juga terjadi antara pekerja laki-laki dan perempuan (Brauw, 2021).

Kesenjangan tidak hanya terjadi dalam sector pertanian. Seperti yang tertuang dalam penelitian “*Pathways to Women’s Empowerment in Bangladesh Employment and Microfinance as Interventions*”, dimana pemerintah mencoba membentuk pemberdayaan perempuan melalui peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, terutama di sektor garmen dan *microfinance*. Dalam usaha intervensi pemerintah ini masih terlihat adanya kendala besar yaitu kendala sosial budaya dan konservatisme di masyarakat.

Zafarullah memperlihatkan bahwa pekerja perempuan di Bangladesh kerap mengalami diskriminasi, pelecehan dan kondisi kerja yang tidak menguntungkan (Zafarullah & Nawaz, 2019).

Selanjutnya artikel yang tidak kalah menarik mengenai proyek Empower Youth for Work (EYW) terhadap pemberdayaan perempuan muda di Bangladesh. Proyek EYW sendiri adalah suatu proyek yang berfokus pada ekonomi dan keseluruhan pemberdayaan masyarakat di daerah yang terdampak perubahan iklim. Dalam artikel yang berjudul *“Paid Work: The Magic Solution for Young Women to Achieve Empowerment? Evidence from the Empower Youth for Work Project in Bangladesh”*, penulis memperlihatkan bahwa kaum perempuan cukup berkontribusi dalam perekonomian negara, dimana mereka diberikan peluang untuk mendapatkan pelatihan keahlian. Melalui pelatihan tersebut mereka dapat menemukan lapangan pekerjaan dan memperoleh penghasilan akan pekerjaan tersebut. Akan tetapi tuntutan norma dalam masyarakat membuat mereka yang bekerja dianggap gagal sebagai istri dan ibu. Para perempuan diizinkan untuk bekerja, tapi setelah menikah mereka diharapkan untuk melepaskan pekerjaan dan berkomitmen penuh pada keluarga (Saha, 2018).

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya terlihat Industri garmen di Bangladesh merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu eksportir terbesar di dunia, industri ini telah menciptakan jutaan lapangan kerja, terutama bagi perempuan, yang menjadi mayoritas pekerja di sektor ini. Peran perempuan dalam industri garmen tidak hanya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Dengan memberikan perempuan akses ke pekerjaan formal, industri garmen membantu mengurangi kemiskinan dan ketergantungan ekonomi pada laki-laki. Namun, di sisi lain, sektor ini juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti kesenjangan upah, diskriminasi gender, dan kurangnya akses perempuan ke posisi kepemimpinan.

Dalam kerangka ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran industri garmen dalam pemberdayaan perempuan di Bangladesh. Fokus utama adalah mengevaluasi sejauh mana partisipasi perempuan dalam sektor ini dapat dikategorikan sebagai pemberdayaan, dengan mempertimbangkan dimensi agensi, akses terhadap sumber daya, dan hasil-hasil konkret yang berdampak pada kehidupan mereka. Penelitian ini juga

akan mengeksplorasi bagaimana perempuan menavigasi struktur sosial yang patriarkal melalui pekerjaan di sektor informal, serta bagaimana industri ini berkontribusi terhadap transformasi sosial yang lebih luas.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan data sekunder yang diperoleh dari literatur akademik, laporan internasional, serta sumber berita terpercaya, penelitian ini berusaha membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika gender dalam ekonomi informal. Di tengah wacana global tentang inklusi ekonomi dan kesetaraan gender, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap formulasi kebijakan yang lebih sensitif gender, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Bangladesh. Penelitian ini tidak hanya menelaah industri garmen sebagai sektor ekonomi, tetapi juga sebagai arena sosial tempat berlangsungnya perubahan-perubahan dalam relasi kuasa, norma gender, dan identitas perempuan.

Dengan demikian, artikel ini berangkat dari asumsi bahwa pemberdayaan perempuan tidak dapat direduksi hanya pada aspek ekonomi, tetapi harus dilihat sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan dalam struktur sosial, budaya, dan politik. Dalam konteks Bangladesh, industri garmen menyediakan pintu masuk yang penting bagi perempuan untuk mengklaim ruang di ranah publik, tetapi efektivitasnya sebagai alat pemberdayaan sangat tergantung pada bagaimana sektor ini terhubung dengan upaya-upaya struktural untuk mengatasi ketimpangan gender. Oleh karena itu, penting untuk menilai peran industri ini secara holistik, dengan mempertimbangkan baik potensi transformatifnya maupun keterbatasan-keterbatasan struktural yang masih menghambat pemberdayaan perempuan secara menyeluruh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dirancang sebagai studi kualitatif berbasis kajian pustaka (*library research*) yang memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber kredibel, baik nasional maupun internasional. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana industri garmen di Bangladesh telah berkontribusi terhadap pemberdayaan perempuan, baik dalam dimensi ekonomi, sosial, maupun kultural. Pendekatan kualitatif digunakan karena isu yang dikaji menyangkut fenomena kompleks yang tidak dapat

direduksi menjadi angka-angka semata, melainkan memerlukan pemahaman terhadap konteks, makna sosial, relasi kekuasaan, dan konstruksi realitas yang dihadapi oleh perempuan pekerja di sektor informal. Penelitian ini tidak mengklaim generalisasi statistik, melainkan berfokus pada kedalaman analisis dan refleksi teoretis terhadap dinamika sosial-ekonomi yang dihadapi perempuan di industri padat karya.

Periodisasi data yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan dari tahun 2015 hingga 2021. Rentang waktu ini dipilih secara strategis karena mencerminkan fase pasca-insiden Rana Plaza pada tahun 2013, yang menjadi titik balik dalam sejarah industri garmen di Bangladesh. Rana Plaza bukan hanya menjadi tragedi kemanusiaan yang merenggut lebih dari seribu nyawa pekerja, yang tidak hanya kebanyakan perempuan, tetapi juga menjadi pemicu reformasi besar-besaran dalam industri garmen global, termasuk peningkatan standar keselamatan kerja, transparansi rantai pasok, dan kampanye etika produksi. Tahun 2015 menandai awal mula kebijakan nasional dan internasional mulai mengintervensi secara serius isu perlindungan pekerja perempuan. Sementara itu, tahun 2021 dipilih sebagai batas akhir karena menandai satu tahun penuh pasca puncak pandemi COVID-19, di mana dinamika sektor informal, termasuk industri garmen, diuji secara intensif dalam hal resiliensi dan keberlanjutan. Dalam konteks inilah, analisis terhadap perubahan indikator pemberdayaan perempuan selama periode tersebut menjadi sangat relevan.

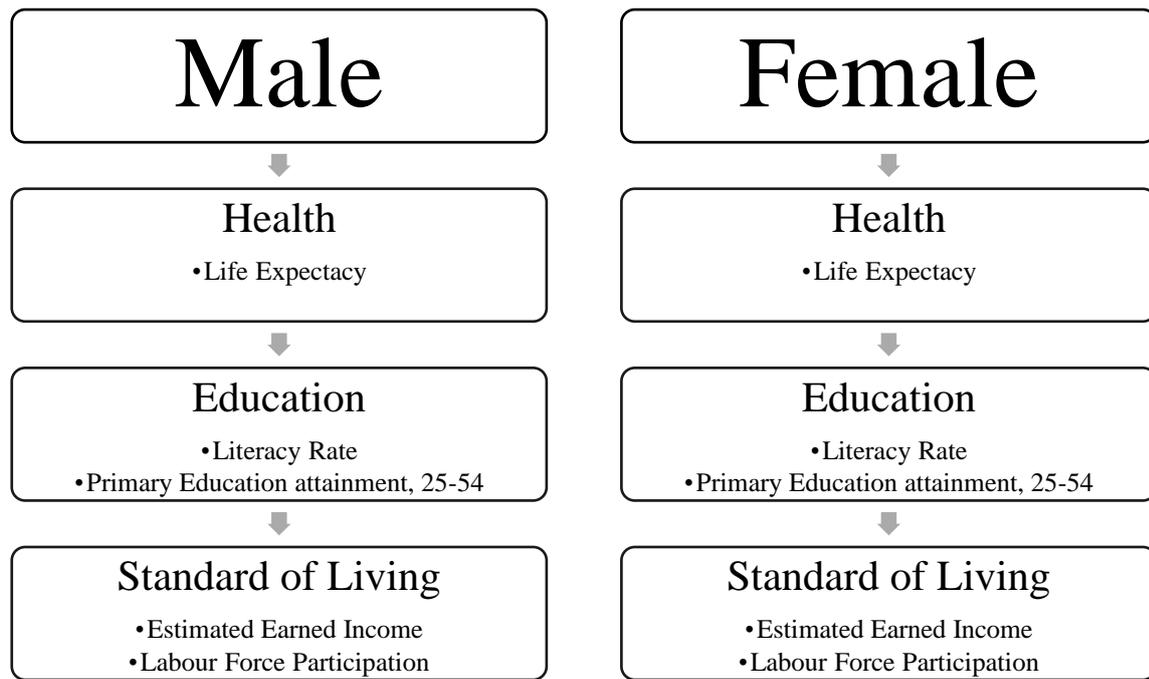
Landasan teoretis penelitian ini dibangun dari sintesis antara teori makro tentang transformasi ekonomi dan sektor informal, serta pendekatan mikro-sosiologis terhadap agensi perempuan dalam struktur sosial patriarkal. Teori makro berperan dalam menjelaskan bagaimana sektor informal—dalam hal ini industri garmen—berfungsi sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif ini, sektor informal tidak lagi dipandang sebagai ekonomi bayangan atau ruang ketidakteraturan, tetapi sebagai mekanisme penting dalam menyerap surplus tenaga kerja, mendorong mobilitas sosial, dan memperkuat daya saing ekspor negara berkembang. Pada negara-negara berkembang seperti Bangladesh, sektor informal berperan bukan hanya sebagai penyangga ekonomi, tetapi juga sebagai penghela transformasi sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan (Huang, 2024; Kakaire, 2023).

Dalam kerangka ini, industri garmen di Bangladesh diposisikan sebagai aktor kunci dalam ekosistem pembangunan yang menghadirkan dinamika baru dalam hubungan antara

negara, kapital, dan gender. Melalui pekerjaannya, perempuan memasuki ruang ekonomi formal atau semi-formal yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Namun, struktur informalitas yang menyertainya—seperti ketiadaan kontrak tetap, upah rendah, dan lemahnya jaminan sosial—membentuk lanskap sosial yang ambivalen, di mana pemberdayaan dan eksploitasi dapat berlangsung secara bersamaan. Maka, untuk membaca kompleksitas ini, diperlukan pendekatan mikro yang menggali dimensi agensi perempuan secara lebih dalam.

Agensi perempuan dalam konteks ini tidak dipahami secara biner sebagai ada atau tidak ada, melainkan sebagai spektrum kemampuan untuk bertindak, menegosiasikan kondisi, dan membentuk arah kehidupan, meskipun dalam batasan-batasan struktural. Pendekatan mikro-sosiologis memberikan ruang untuk memahami bagaimana perempuan memaknai kehadiran mereka dalam sektor garmen bukan sekadar sebagai tenaga kerja pasif, tetapi sebagai pelaku yang memiliki daya intervensi, baik dalam bentuk ekspresi terbuka maupun resistensi subtil (Bijos, 2006; Jokinen, 2016; Wilson, 1998). Dalam banyak kasus, agensi tersebut diwujudkan dalam keputusan sehari-hari—seperti memilih untuk tetap bekerja meski ditentang keluarga, menolak promosi karena tekanan beban ganda, atau membentuk solidaritas komunitas di lingkungan kerja.

Untuk menghubungkan antara struktur makro dan dinamika mikro tersebut, penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan dari Naila Kabeer (1999) sebagai kerangka konseptual utama. Teori ini menawarkan pemahaman yang komprehensif terhadap proses pemberdayaan, yang tidak hanya dilihat sebagai hasil akhir (*outcome*), tetapi juga sebagai proses dinamis yang mencakup dimensi *resources* (akses terhadap sumber daya), *agency* (kemampuan bertindak dan mengambil keputusan), dan *achievements* (hasil konkret yang menunjukkan perubahan status atau kondisi hidup) (Kabeer, 1999). Teori ini sangat relevan karena memungkinkan evaluasi yang tidak hanya bersifat materialistik (misalnya, peningkatan pendapatan), tetapi juga mencakup transformasi dalam kesadaran, relasi kuasa, dan identitas sosial perempuan.



**Gambar 1. Framework Indikator *Human Development Index* berdasarkan Gender**

Dalam pengukuran pemberdayaan perempuan, penelitian ini mengacu pada dua sistem indikator yang telah diakui secara internasional, yakni **Global Gender Gap Index** dari World Economic Forum (WEF), dan **Gender Inequality Index** dari Human Development Index (HDI) yang dikembangkan oleh UNDP (United Nations, 2023). Kedua sistem ini dipilih karena memiliki pendekatan yang multidimensi dan memungkinkan komparasi lintas waktu serta lintas negara. Indikator WEF mencakup empat bidang utama: partisipasi dan kesempatan ekonomi, tingkat pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, serta pemberdayaan politik. Sementara itu, HDI-GII memfokuskan pada kesehatan reproduksi, pemberdayaan (melalui pendidikan dan representasi politik), serta partisipasi dalam pasar tenaga kerja.

Kesesuaian indikator ini dengan konteks penelitian terletak pada kemampuannya untuk menilai pemberdayaan perempuan secara holistik, tidak hanya dari sisi partisipasi ekonomi, tetapi juga akses terhadap hak-hak dasar dan kontrol atas kehidupan pribadi. Misalnya, dalam konteks industri garmen, data dari WEF dapat digunakan untuk melihat tren kesetaraan dalam upah dan partisipasi kerja, sementara indikator HDI-GII membantu memetakan keterkaitan antara kondisi kerja dengan akses terhadap layanan kesehatan, hak maternitas, dan pendidikan lanjutan. Dengan demikian, pendekatan ini memperkaya analisis

yang tidak berhenti pada pencapaian numerik, tetapi juga mempertimbangkan struktur ketimpangan yang lebih luas.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi yang komprehensif, dengan menelusuri jurnal ilmiah, laporan tahunan WEF dan UNDP, publikasi dari ILO, data resmi dari pemerintah Bangladesh, serta artikel berita dan laporan investigatif dari media nasional maupun internasional. Data kemudian dianalisis secara tematik dengan pendekatan kualitatif interpretatif. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema kunci yang sesuai dengan indikator pemberdayaan, mengkaitkannya dengan konteks sosial-kultural, serta menafsirkan makna dari data tersebut dalam kerangka teori yang telah ditetapkan.

Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian ini tidak hanya berupaya mengevaluasi apakah industri garmen telah meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan, tetapi juga menelaah bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap agensi dan transformasi kehidupan perempuan dalam struktur sosial yang patriarkal. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih dalam tentang bagaimana kekuatan ekonomi dan struktur sosial berinteraksi dalam membentuk kemungkinan (atau keterbatasan) pemberdayaan perempuan di sektor informal.

Penelitian ini juga mempertimbangkan keterbatasan metodologis yang melekat dalam studi berbasis data sekunder, seperti ketergantungan pada akurasi dan kelengkapan data yang tersedia. Namun, melalui triangulasi sumber dan penguatan dengan kerangka teori yang kokoh, interpretasi yang dihasilkan diharapkan tetap valid dan berkontribusi secara signifikan dalam diskursus akademik dan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dalam sektor informal.

## **PEMBAHASAN**

### **Ketimpangan Struktural dalam Indikator Pembangunan Manusia: Paradoks Partisipasi dan Pemberdayaan**

Pemberdayaan perempuan telah menjadi topik sentral dalam pembangunan global, namun di banyak negara berkembang seperti Bangladesh, pemberdayaan tersebut kerap hanya tampak di permukaan. Seperti yang terlihat pada indikator pembangunan manusia sebagaimana tertuang dalam Tabel 1, ada sebuah ironi struktural yang tidak dapat diabaikan.

Indeks-indeks seperti harapan hidup, pendidikan dasar, dan tingkat melek huruf pada perempuan menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan selama rentang 2015–2021. Misalnya, harapan hidup perempuan meningkat dari 62 menjadi 64.4 tahun, dan pencapaian pendidikan dasar naik dari 93% menjadi 93.7%. Namun di sisi lain, pendapatan aktif mereka hanya menyentuh angka \$2.5 pada 2021, jauh di bawah laki-laki yang mencapai \$6.2 (The World Bank, 2022; World Economic Forum, 2021).

**Tabel 1. Indikator Indeks Pembangunan Manusia**

Tahun	Gender	Indikator Indeks				
		Kesehatan	Pendidikan		Standar Hidup	
		Harapan Hidup (Tahun)	Tingkat Buta Huruf (%)	Pendidikan Dasar (%)	Penghasilan Aktif (\$)	Partisipasi Tenaga Kerja (%)
2015	Laki-laki	60	65	90	4.1	87
	Perempuan	62	58	93	2.1	41
2016	Laki-laki	60	65	88	4.4	83
	Perempuan	62	58	92	1.7	42
2017	Laki-laki	61.9	75.6	86.1	4.7	83.3
	Perempuan	62.9	69.9	95.1	2.3	45.1
2018	Laki-laki	62.6	75.7	88.1	5.1	81.9
	Perempuan	64.1	70.1	93.0	2.5	45.2
2020	Laki-laki	62.6	76.7	91.5	5.6	83.9
	Perempuan	64.1	71.2	93.7	2.3	44
2021	Laki-laki	64.2	76.7	91.5	6.2	84.2
	Perempuan	64.4	71.2	93.7	2.5	44

**Sumber:** Diolah berdasarkan Data World Economic Forum dan World Bank

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan Bangladesh mengalami peningkatan dalam aspek pendidikan dan kesehatan, pencapaian tersebut tidak sepenuhnya berkonversi menjadi kekuatan ekonomi yang sepadan. Ini menegaskan kritik terhadap pendekatan pembangunan yang terlalu fokus pada akses tanpa memperhatikan kendala struktural yang membatasi hasil nyata yang dapat dicapai perempuan. Dengan kata lain, akses tanpa agensi hanyalah partisipasi semu.

Dalam literatur pembangunan, (Kabeer, 1999) menekankan pentingnya tiga dimensi pemberdayaan: resources (sumber daya), agency (agensi), dan achievements (pencapaian). Di Bangladesh, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan memang meningkat, namun dimensi

agensi dan pencapaian masih timpang. Hal ini tampak dari stagnannya partisipasi tenaga kerja perempuan selama bertahun-tahun, yang tetap berada di angka 44% sejak 2018. Bahkan ketika perempuan memperoleh penghasilan, dalam banyak kasus pendapatan tersebut tidak dikelola oleh mereka sendiri, melainkan dikendalikan oleh suami atau anggota keluarga laki-laki lainnya.

Masalahnya bukan hanya pada ekonomi rumah tangga, melainkan pada norma sosial yang membatasi ruang gerak perempuan. Struktur patriarki yang dalam membentuk anggapan bahwa perempuan hanya bekerja "sementara", sebelum kembali ke peran domestik setelah menikah. Para perempuan sering menghadapi tekanan sosial terkait peran tradisional mereka sebagai istri dan ibu. Keterlibatan mereka dalam pekerjaan berbayar menimbulkan beban ganda, karena mereka harus menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dengan harapan rumah tangga. Perjuangan ini dapat menimbulkan persepsi kegagalan dalam memenuhi peran mereka, terutama ketika mereka mengalami perpisahan dengan anak-anak mereka atau tidak dapat memenuhi kewajiban keluarga karena jam kerja yang panjang (Akhter, 2018). Dengan demikian, partisipasi mereka dalam dunia kerja memperumit identitas tradisional mereka.

Dari perspektif ini, ketimpangan tidak hanya muncul dalam angka, tetapi juga dalam pengalaman sosial perempuan. Mereka menghadapi beban ganda, yakni bekerja di luar rumah tanpa adanya pembagian peran domestik yang adil. Akibatnya, perempuan kerap kelelahan secara fisik dan emosional, sehingga menolak promosi ke posisi lebih tinggi karena khawatir menambah beban mereka (Jokinen, 2016). Ini adalah bentuk agensi yang subtil namun signifikan, yakni memilih bertahan dalam batasan, bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena tekanan dari norma sosial yang tidak setara.

Lebih jauh, ketimpangan dalam penghasilan aktif menunjukkan bahwa perempuan belum mampu memaksimalkan peran ekonomi mereka. Bahkan saat mereka berkontribusi secara finansial, kontribusi tersebut tidak diakui secara sosial. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi "penyangga ekonomi rumah tangga" tanpa diberi ruang untuk berpendapat dalam pengambilan keputusan rumah tangga, termasuk alokasi pengeluaran, pendidikan anak, dan pemanfaatan waktu luang.

Dengan mengacu pada pendekatan gender dalam Human Development Index (HDI) dan Gender Inequality Index (GII), terlihat bahwa indikator seperti kesehatan reproduksi, keterwakilan politik, dan akses terhadap posisi manajerial sangat menentukan kualitas hidup

perempuan. Sayangnya, dalam konteks Bangladesh, indikator-indikator ini masih tertinggal. Pekerjaan perempuan tidak serta-merta meningkatkan posisi tawar mereka di dalam keluarga maupun masyarakat.

Akhirnya, indikator pembangunan manusia yang bersifat kuantitatif perlu dipadukan dengan pendekatan kualitatif yang mampu menggali dinamika sosial-kultural secara lebih mendalam. Tanpa pendekatan ini, kita hanya melihat pemberdayaan dari permukaan tanpa memahami kontradiksi internal yang melingkupinya. Oleh karena itu, intervensi kebijakan tidak boleh hanya berfokus pada akses pendidikan dan kerja, tetapi harus mendorong transformasi struktural yang memungkinkan perempuan memiliki kontrol atas hidup mereka sendiri.

### **Segmentasi Gender dalam Industri Garmen: Representasi Tanpa Redistribusi**

Industri garmen di Bangladesh telah lama dipuji sebagai sektor ekonomi yang membuka pintu bagi perempuan untuk memasuki dunia kerja formal. Namun, ketika ditelaah lebih jauh, sebagaimana tertuang dalam Tabel 2, kita menemukan bahwa representasi perempuan yang sangat tinggi dalam jumlah tidak diiringi dengan distribusi kekuasaan dan kontrol yang sepadan.

Sebanyak 97.1% perempuan yang bekerja di industri garmen menempati posisi sebagai pekerja produksi. Hanya 0.9% dari mereka yang berhasil mencapai level manajerial, dibandingkan dengan 11.4% laki-laki yang menempati posisi tersebut (International Labour Organization, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan terkonsentrasi di lapisan bawah dari struktur organisasi industri, dan mengalami kesulitan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Bahkan dalam pekerjaan produksi, dominasi perempuan paling tinggi terdapat pada tingkat 4 dan 5, sedangkan pada tingkat 6 dan 7, proporsi laki-laki meningkat. Ini adalah bukti bahwa mobilitas vertikal dalam sektor ini tetap didominasi oleh laki-laki.

**Tabel 2. Distribusi Pekerja Industri Garmen Bangladesh, 2018**

<b>Kategori pekerjaan</b>	<b>Laki-laki (%)</b>	<b>Perempuan (%)</b>	<b>Total</b>
A. Manajer	11.4	0.9	6.2
B. Staf	7.2	0.7	4
C. Pekerja Produksi	80.8	97.1	88.9

Tingkat 1	1.6	0.8	1.2
Tingkat 2	2	1	1.4
Tingkat 3	9.5	11.3	10.5
Tingkat 4	21	24.2	22.8
Tingkat 5	14.3	17.6	16.2
Tingkat 6	15.2	19.6	17.7
Tingkat 7	17.2	22.4	20.2
Pekerja Magang	0.1	0.1	0.1
D. Pekerja non-produksi	0.6	1.4	1
Jumlah Pekerja (A+B+C+D)	100	100	100

Sumber: ILO and UN Women

Fenomena ini dikenal sebagai *vertical segregation*, yaitu ketimpangan dalam distribusi posisi kerja berdasarkan gender. Perempuan memang hadir secara besar-besaran dalam angka statistik, namun mereka tidak memiliki kendali atas proses produksi atau kebijakan organisasi. Dalam konteks teori pemberdayaan, ini merupakan bentuk representasi tanpa redistribusi. Mereka “ada”, tetapi tidak berdaya dalam struktur.

Stereotip gender secara historis menggambarkan perempuan sebagai sosok yang tidak memiliki sifat-sifat yang secara tradisional dikaitkan dengan kepemimpinan, seperti ketegasan dan ketegasan. Persepsi ini sangat mengakar dalam banyak budaya dan terus memengaruhi sikap terhadap perempuan dalam peran kepemimpinan (Thomas, 2017; Venotha & Mariadoss, 2022). Di sektor garmen di Bangladesh, eksperimen menunjukkan bahwa keyakinan awal yang negatif tentang kemampuan supervisor perempuan berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas dan evaluasi mereka. Penelitian menunjukkan bahwa bias ini mengarah pada asumsi yang salah tentang keterampilan dan produktivitas kandidat perempuan dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka (Macchiavello et al., 2020). Ketika perempuan mengajukan diri untuk posisi yang lebih tinggi, mereka kerap dianggap tidak layak karena dianggap kurang tegas, atau tidak bisa memisahkan antara urusan rumah tangga dan pekerjaan. Padahal, dalam banyak kasus, perempuan lebih teliti, bertanggung jawab, dan lebih sabar menghadapi tekanan kerja di pabrik.

Diskriminasi struktural ini bukan hanya persoalan budaya organisasi, tetapi merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat Bangladesh. Patriarki tidak hanya berlangsung di rumah, tetapi juga di tempat kerja. Oleh karena itu, meskipun

sektor garmen menjadi motor ekonomi, ia juga menjadi reproduktor ketimpangan sosial berbasis gender.

Lebih ironis lagi, banyak perempuan yang sudah bekerja selama lebih dari 10 tahun di sektor garmen, namun tidak memiliki jaminan sosial, pensiun, atau pelatihan lanjutan. Mereka terjebak dalam pekerjaan yang monoton, berisiko tinggi, dan tidak memberikan prospek masa depan. Dalam konteks ini, kerja bukanlah jalan keluar dari kemiskinan, tetapi bentuk lain dari eksploitasi.

Salah satu faktor yang memperkuat ketimpangan ini adalah absennya mekanisme perlindungan hukum yang berpihak pada pekerja perempuan. Meskipun ada peraturan pemerintah tentang upah minimum dan jam kerja, dalam praktiknya banyak perusahaan tidak menerapkannya secara konsisten. Perempuan yang bersuara atau menuntut haknya sering kali diintimidasi, bahkan dipecat tanpa kompensasi. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi tanpa jaminan hukum hanya akan memperluas kerentanan perempuan, bukan memperkuat posisinya.

Maka dari itu, pembacaan terhadap peran industri garmen tidak bisa dilepaskan dari konteks struktural yang melingkupinya. Sektor ini harus dilihat bukan hanya sebagai motor ekonomi, tetapi juga sebagai arena kontestasi sosial. Perempuan yang bekerja di sektor ini tidak hanya mencari nafkah, tetapi juga menegosiasikan posisi mereka dalam struktur kekuasaan sosial yang patriarkal.

Dalam hal ini, kebijakan pemerintah dan intervensi lembaga internasional perlu didorong untuk tidak hanya meningkatkan jumlah perempuan dalam pekerjaan formal, tetapi juga menciptakan jalur karir yang adil, sistem pelatihan berkelanjutan, dan perlindungan hukum yang menyeluruh. Tanpa itu semua, representasi perempuan hanya akan menjadi angka statistik tanpa makna pemberdayaan sejati.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa industri garmen di Bangladesh memang memainkan peran penting dalam membuka akses ekonomi bagi jutaan perempuan, namun peran tersebut belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai bentuk pemberdayaan yang substantif. Melalui analisis terhadap indikator pembangunan manusia dan distribusi posisi

kerja dalam sektor garmen, ditemukan bahwa terdapat ketimpangan struktural yang signifikan dalam hal penghasilan, partisipasi tenaga kerja, serta mobilitas vertikal di lingkungan kerja.

Di satu sisi, perempuan di Bangladesh telah menunjukkan kemajuan dalam hal pendidikan dasar, harapan hidup, dan akses terhadap pekerjaan formal, sebagaimana ditunjukkan dalam peningkatan berbagai indikator dari tahun 2015 hingga 2021. Namun di sisi lain, perempuan masih tertinggal dalam hal penghasilan aktif, partisipasi tenaga kerja, dan akses terhadap posisi kepemimpinan di sektor garmen. Dominasi laki-laki pada level manajerial dan staf, serta terkonsentrasinya perempuan dalam posisi produksi tingkat rendah, memperlihatkan adanya segmentasi gender yang tajam dan berkelanjutan.

Dalam perspektif teori pemberdayaan Naila Kabeer, kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pekerjaan (resources) belum sepenuhnya berbanding lurus dengan agensi (agency) dan pencapaian (achievement). Pemberdayaan yang dimaksud seharusnya tidak hanya diukur dari kehadiran perempuan dalam sektor ekonomi formal, tetapi juga dari sejauh mana mereka mampu mengontrol pendapatan, mengambil keputusan strategis, serta mengalami perubahan posisi dalam struktur sosial yang sebelumnya menempatkan mereka secara subordinatif.

Lebih lanjut, pembahasan juga memperlihatkan bahwa industri garmen bukan hanya ruang produksi ekonomi, tetapi juga arena sosial yang sarat dengan kontestasi norma patriarkal, ketimpangan kuasa, dan bentuk-bentuk resistensi halus dari perempuan. Dalam konteks ini, industri garmen berfungsi sebagai motor ekonomi yang ambivalen: membuka peluang sekaligus membatasi otonomi perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhter, S. (2018). *Health and Safety Issues for Women Working in the Ready-Made Garment Industry in Bangladesh*. <https://doi.org/10.25904/1912/885>
- Bijos, L. (2006). Gender, Power, Financial Access, and Development in Latin America: Comparing Brazilian and Bolivian Cases. *Law and Business Review of the Americas*, 12(3), 341.

- Brauw, A. de. (2021). Migration, labor and women's empowerment: Evidence from an agricultural value chain in Bangladesh. *World Development*, 142. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105445>
- Chowdhury, F. S., & Shajahan, S. (2021). Unboxing the ready made garments (RMG) sector of Bangladesh. ... *Journal of Research in Business and ...*
- Das, D. (2023). *Intersecting Hierarchies: Individual and Societal Correlates of Women's Autonomy within Household*. <https://doi.org/10.32388/8zdwie>
- Ganbold, S. (2022). *Share of Total Exports of Ready-Made garments (RMG) in Bangladesh from 2012 to 2021*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/987683/bangladesh-garment-share-total-exports/>
- Gocio, D. (2016). Women's empowerment and economic development: The cases of Bangladesh and Kenya. In *International Journal of Education Economics and Development* (Vol. 7, Issue 3, pp. 113–132). <https://doi.org/10.1504/IJEED.2016.082171>
- Huang, G. (2024). *Informal economies* (pp. 449–463). <https://doi.org/10.4324/9780429265853-40>
- Hussain, I. (2021). Hasinomics: Bangladesh Is a Development Miracle. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, June.
- International Labour Organization. (2020). *Understanding the Gender Composition and Experience of Ready-Made Garment (RMG) Workers in Bangladesh*. [www.ilo.org/publns](http://www.ilo.org/publns)
- Islam, M. A., Jantan, A. H., Aldaihani, F. M. F., Rahman, M. A., Khan, A. M., Shahin, S., & Alam, M. N. (2018). Impact of Empowerment, Flexibility and Trust on Women's Access to Senior Positions in RMG Industry of Bangladesh. *International Journal of Entrepreneurship*, 22(3). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3416065>
- Jokinen, E. (2016). Precarious everyday agency. *European Journal of Cultural Studies*, 19(1), 85–99. <https://doi.org/10.1177/1367549415585548>
- Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Kakaire, A. (2023). Formalization of Informal Sector Business Enterprises and Accessibility to Social Security Services by Workers in Uganda's Informal Sector. *Journal of Management Scholarship*, 2(1). <https://doi.org/10.38198/JMS/2.1.2023.11>

- Macchiavello, R., Menzel, A., Rabbani, A., & Woodruff, C. (2020). *Challenges of Change: An Experiment Promoting Women to Managerial Roles in the Bangladeshi Garment Sector*. National Bureau of Economic Research. [https://www.nber.org/system/files/working\\_papers/w27606/w27606.pdf](https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27606/w27606.pdf)
- Murshid, N. S. (2018). Microfinance Participation and Women's Empowerment: Evidence from a Nationally Representative Sample of Women in Bangladesh. *Journal of Social Service Research*, 44(3), 375–390. <https://doi.org/10.1080/01488376.2018.1476287>
- Rama, A., Celestin, B. N., Chen, S., & Martin, K. (2022). Assessment of Eco-Innovation Drivers within the Informal Sector in Ghana. *Sustainability*, 14(11), 6903. <https://doi.org/10.3390/su14116903>
- Ranawana, A. (2022). *Bangladesh a Surprising Economic Success*. Economynext. <https://economynext.com/bangladesh-a-surprising-economic-success-93374/>
- Saha, P. (2018). Paid Work: The Magic Solution for Young Women to Achieve Empowerment? Evidence from The Empower Youth for Work Project in Bangladesh. *Gender and Development*, 26(3), 551–568. <https://doi.org/10.1080/13552074.2018.1525869>
- Sansiya, P. (2013). *Women in Informal Sector (A Sociological Inquiry)*.
- Sen Sharma, S. (2020). Women's Empowerment in Bangladesh: Understanding through the case of Readymade Garment Sector. *Gender and Women's Studies*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.31532/gendwomensstud.3.1.004>
- Swazan, I. S., & Das, D. (2022). Bangladesh's Emergence as a Ready-Made Garment Export Leader: An Examination of the Competitive Advantages of the Garment Industry. In *International Journal of Global Business and ...*. Springer. <https://doi.org/10.1007/s42943-022-00049-9>
- Tengland, P.-A. (2008). Empowerment: A Conceptual Discussion. *Health Care Analysis*, 16(2), 77–96. <https://doi.org/10.1007/S10728-007-0067-3>
- The World Bank. (2022). *Bangladesh Development Update Recovery and Resilience Amid Global Uncertainty*. [www.worldbank.org/bd](http://www.worldbank.org/bd)
- Thomas, S. (2017). *Women in Business Leadership*. <https://digitalcommons.murraystate.edu/bis437/109/>
- United Nations. (2023). Human Development Index. In *Human Development Reports*.
- Venotha, A. S., & Mariadoss, Dr. S. (2022). An Investigation of the Leadership Challenges amongst Women Entrepreneurs. *International Journal for Research in Applied Science*

- and Engineering Technology*, 10(12), 2126–2130.  
<https://doi.org/10.22214/ijraset.2022.48423>
- Wilson, T. D. (1998). Approaches to Understanding the Position of Women Workers in the Informal Sector. *Latin American Perspectives*, 25(2), 105–119.  
<https://doi.org/10.1177/0094582X9802500206>
- World Bank Group. (2021). *GDP growth (annual %) - Bangladesh | Data*.  
<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2021&locations=BD&start=2000&view=chart>
- World Economic Forum. (2021). *Global Gender Gap Report 2021*.  
<http://reports.weforum.org/global->
- Yusuf, S. (2021). *Bangladesh: Growth Miracle or Mirage?* Centre for Global Development.  
bangladesh: Growth Miracle or Mirage?
- Zafarullah, H., & Nawaz, F. (2019). Pathways to Women’s Empowerment in Bangladesh: Employment and Microfinance as Interventions. *Asian Education and Development Studies*, 8(4), 387–404. <https://doi.org/10.1108/AEDS-11-2018-0168>
- Ziaur Rahman, M., Sony, M., Shakhawat Hossen Rubel, M., Alam, M., & Akther Liza, R. (2020). Steps toward Smooth Graduation of Bangladesh from Least Development Countries. *Journal of Contemporary Research in Social Sciences*, 2(3), 57–67.  
<https://doi.org/10.33094/26410249.2020.23.57.67>